



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENDAMPING IMPLEMENTASI ISO 37301:2021
Nomor: B.14003/BPKH/BP/A7.4/10/2022**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Implementasi ISO 37301:2021

Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

- 1) Menyusun Project Plan Detail Implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan;
- 2) Melaksanakan awareness ISO 37301:2021 kepada insan BPKH sebanyak 2 (dua) kali dalam periode pekerjaan;
- 3) Melakukan analisa dan pendampingan implementasi ISO 37301:2021 (Gap Analysis);
- 4) Membantu mengidentifikasi, mereviu, menyusun, dan melakukan penilaian risiko kepatuhan pada ruang lingkup ISO 37301: 2021;
- 5) Mereview dan memberikan masukan peraturan yang mensasar ketidakpatuhan pada proses bisnis bidang-bidang di BPKH;
- 6) Membantu memberikan panduan untuk mempersiapkan dokumen dan penyusunan pedoman terkait implementasi ISO 37301:2021;
- 7) Membantu mempersiapkan pemenuhan setiap klausul yang dipersyaratkan pada ISO 37301:2021; dan
- 8) Melakukan serah terima seluruh luaran (laporan kegiatan) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.

Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

1. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai *Team Leader*/Ketua Tim, dengan kualifikasi:
 - a) pendidikan minimal strata dua (S2) dengan pengalaman 3 tahun;
 - b) memiliki sertifikasi *lead implementer* di sistem manajemen kepatuhan berbasis ISO 37301:2021 atau ISO 37001: 2016;
 - c) berpengalaman minimal 1 (satu) proyek dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait SOP, atau penyusunan kebijakan dan SOP;
 - d) berpengalaman dalam pendampingan ISO 37301:2021 atau ISO 37001: 2016 minimal 1 kali

- dalam kurun waktu 1 tahun terakhir;
- e) pernah menjadi *team leader* minimal 2 (dua) proyek yang berhubungan dengan penyusunan SOP dan/atau audit kepatuhan dalam durasi 3 tahun terakhir di lembaga keuangan/BUMN/BUMD.
2. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai anggota Tim, dengan kualifikasi:
 - a) pendidikan minimal strata satu (S1) dengan pengalaman 3 tahun;
 - b) berpengalaman dalam pendampingan ISO 37301:2021 atau ISO 37001:2016 ; dan
 - c) pernah terlibat minimal 2 (dua) proyek yang berhubungan dengan penyusunan SOP dan/atau audit kepatuhan dalam durasi 3 tahun terakhir.
 3. Menyediakan 1 (satu) orang Fasilitator dengan kualifikasi:
 - a) tingkat pendidikan minimal S1;
 - b) pengalaman kerja minimal 1 tahun pada bidang compliance atau governance;
 - c) berpengalaman menyusun dokumen teknis minimal 1 kali dalam pelaksanaan ISO 37301:2021 atau ISO 37001:2016.

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Memiliki izin usaha sebagai jasa aktivitas konsultasi manajemen dengan kode KBLI 7020

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) paket Jasa Konsultan Pendamping dengan 2 (dua) Keluaran (*Output*) berupa:

1. 1 (satu) Set Pedoman Pendampingan Implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan;
2. (satu) Laporan Kegiatan Pendampingan Implementasi ISO 37301:2021.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui **email divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Kamis, 20 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Implementasi ISO 37301:2021*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Mengingat pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Jumat – Kamis, 14 – 20 Oktober 2022	Jumat, 16.00 WIB	Kamis, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Jumat – Kamis, 14 – 20 Oktober 2022	Jumat, 16.00 WIB	Kamis, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Jumat – Selasa, 21 – 25 Oktober 2022	Jumat, 08.00 WIB	Selasa, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu – Jumat, 26 – 28 Oktober 2022	Rabu, 08.00 WIB	Jumat, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Senin, 31 Oktober 2022	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Oktober 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B.14003/BPKH/BP/A7.4/10/2022

Tanggal : 14 Oktober 2022

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.